**­­PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA PROFESI BIDAN DALAM MENANGANI PERSALINAN DI HUBUNGKAN DENGAN**

**UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Magister Ilmu Hukum**

Disusun Oleh

**Nama :** **Resi Rizkiari Sri Martiani**

**NPN :** **198040026**

**Konsentrasi : Hukum Kesehatan**

Di bawah Bimbingan:

**Dr. T. Subarsyah, S.H., S.Sos., Sp.I., M.M**

**Dr. Siti Rodiah., S.H., M.H.,**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2022**

**­­**

**PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA PROFESI BIDAN DALAM MENANGANI PERSALINAN DI HUBUNGKAN DENGAN**

**UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN**

**TESIS**

**Dejuan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Magister Ilmu Hukum**

Disusun Oleh

**Nama :** **Resi Rizkiari Sri Martiani**

**NPN :** **198040026**

**Konsentrasi : Hukum Kesehatan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pembimbing I** | **Pembimbing II** |
|  |  |
| **Dr. T. Subarsyah, S.H., S.Sos., Sp.I., M.M** | **Dr. Siti Rodiah, S.H., M.H.,** |

**LEMBAR PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Resi Rizkiari Sri Martiani

NPM : 198040026

Kosentrasi : Hukum Kesehatan

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya buat adalah:

1. Belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di

Universitas Pasundan maupun perguruan tinggi lainnya;

1. Murni gagasan, rumusan dan hasil penulisan penulis dengan arahan dosen pembimbing;
2. Di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang beraku di Uiversitas Pasundan

Bandung, Juni 2022

Resi Rizkiari Sri Martiani

**Abstrak**

Pertanggungjawaban pelayanan kesehatan persalinan bagi ibu hamil oleh bidan harus berdasarkan pada standar profesi, standar prosedur operasional, kode etik, dan perundang-undangan. Jika dalam melaksanakan kewajibannya bidan melakukan kesalahan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, dan pasien yang dirugikan dapat mengajukan pertanggungjawaban melalui gugat berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menerangkan bagaimana pertanggungjawaban perdata profesi bidan dalam menangani persalinan, dan pelaksanaan pertanggungjawaban perdata profesi bidang dalam menangani praktik persalinan, serta permasalahan dan proses penyelesaian permasalahan pertanggungjawaban perdata profesi bidan dalam menangani persalinan dihubungkan dengan UU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan.

Metode penelitian ini menggunakan model deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan menganalisis undang-undang tentang kebidanan yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban perdata profesi bidan dalam praktik persalinan. Tahap penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan lapangan. Data yang telah diperoleh dari studi dokumen kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Data hasil interview dianalisa secara interpretatif kualitatif menggunakan teori dan hukum positif serta kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pertanggungjawaban perdata profesi bidan dalam menangani persalinan ibu hamil, dan kewenangannya diatur dalam Pasal 46 dan 47 UU No 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dalam menjalankan praktiknya. Selain itu diatur dalam Pasal 17 dan 21 Kepmenkens RI No.900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan. Pertanggungjawaban perdata timbul karena adanya kelalaian di saat melakukan pertolongan persalinan dan menimbulkan kerugian bagi klien, maka bidan harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Bentuk tanggung jawab diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu ganti kerugian. Sebab itu, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam tindakan, maka pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang  
berhubungan dengan praktik bidan harus dilaksanakan secara berkala oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia sehingga bidan selalu bekerja sesuai dengan kewenangannya.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban, Bidan, dan Persalinan*

***Abstract***

*The responsibility for maternity health services for pregnant women by midwives must be based on professional standards, standard operating procedures, codes of ethics, and legislation. If in carrying out their obligations the midwife makes a mistake, then she can be held accountable in a civil manner, and the injured patient can apply for accountability through a lawsuit based on a default or an act against the law. This study explains how the civil responsibility of the midwife profession in handling childbirth, and the implementation of the civil liability of the profession in the field of handling childbirth practices, as well as problems and the process of resolving the problem of the civil liability of the midwife profession in handling childbirth are linked to Law Number 4 of 2019 concerning Midwifery.*

*This research method uses a descriptive analytical model with a normative juridical approach and analyzes the law on midwifery that is associated with the civil liability of the midwife profession in childbirth practice. The research phase was carried out with library and field research. The data that has been obtained from the document study are then analyzed in a qualitative juridical manner. The data from the interviews were analyzed qualitatively using positive theory and law and then conclusions were drawn.*

*The results of the study show that the civil responsibility of the midwife profession in handling the delivery of pregnant women, and their authority is regulated in Articles 46 and 47 of Law No. 4 of 2019 concerning Midwifery in carrying out their practice. In addition, it is regulated in Articles 17 and 21 of Kepmenkens RI No. 900/MENKES/SK/VII/2002 concerning the Registration and Practice of Midwives. Civil liability arises due to negligence during delivery assistance and causes harm to the client, so the midwife must be responsible for her actions. The form of responsibility is regulated in Article 1365 of the Civil Code, namely compensation. Therefore, in order to minimize the occurrence of errors in actions, supervision of the implementation of laws and regulations that apply related to the practice of midwives must be carried out periodically by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia so that midwives always work in accordance with their authority.*

***Keywords:*** *Accountability, Midwife, and Childbirth*

**Kata Pengantar**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini.

Pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. T. Subarsyah, S.H., S. Sos., Sp.I., M.M., sebagai Pembimbing I dan Dr. Siti Rodiah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II yang telah sangat meluangkan waktu membimbing, mengarahkan dan memotivasi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Di samping itu saya ingin haturkan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penyelesaian tesis ini:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf, Sp. M.Si., M. Kom., selaku Rektor Universitas Pasundan
2. Prof. Dr. H.M. Didi Turmudzi, MSi selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pasundan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk meningkatkan pengetahuan di bidang hukum.
3. Dr. Dedy Hernawan, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan semangat dan perhatian kepada saya untuk menyelesaikan tesis ini.
4. dr. Agung Darwis Suriaatmadja, selaku Direktur RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta yang telah memberikan dukungan dan izin penelitian.
5. Ibu dan Bapak / Kepala Instalasi, Sub Koordinator Kebidanan, Ketua Sub Ikatan Bidan Indonesia, Ketua Sub Komite Keselamatan Pasien, Manajer Pelayanan Pasien, Anggota Komite Etik dan Hukum di RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta yang telah bersedia melengkapi data untuk menyelesaikan tesis ini
6. Rekan-rekan mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung.
7. Semua pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam proses penelitian dan penyusunan tesis ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penelitian selanjutnya.

Bandung, Juni 2022

Peneliti

**Daftar Isi**

|  |  |
| --- | --- |
| Lembar Judul................................................................................ | i |
| Lembar Pengesahan...................................................................... | ii |
| Lembar Penyataan......................................................................... | iii |
| Abstrak.......................................................................................... | iv |
| Kata Pengantar.............................................................................. | vi |
| Daftar Isi....................................................................................... | viii |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BAB I** | **PENDAHULUAN .......................................................** | 1 |
|  | 1. Latar Belakang Penelitian........................................ | 1 |
|  | 1. Identifikasi Masalah................................................. | 22 |
|  | 1. Tujuan Penelitian ..................................................... | 23 |
|  | 1. Kegunaan Penelitian................................................. | 23 |
|  | 1. Kerangka Pemikiran................................................. | 24 |
|  | 1. Metode Penelitian..................................................... | 57 |
|  | 1. Metode Pendekatan............................................ | 57 |
|  | 1. Spesialisasi Penelitian........................................ | 58 |
|  | 1. Tahap Penelitian................................................. | 58 |
|  | 1. Teknik Pengumpulan Data................................. | 61 |
|  | 1. Alat Pengumpulan Data...................................... | 62 |
|  | 1. Analisis Data...................................................... | 62 |
|  | 1. Lokasi Penelitian................................................ | 62 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BAB II** | **TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PROFESI BIDAN DALAM PERSALINAN ......................................................** | 64 |
|  | 1. Pengertian Pertanggungjawaban..................... | 64 |
|  | 1. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum............. | 70 |
|  | 1. Tanggung Jawab Bidan................................... | 80 |
|  | 1. Standar Profesi Bidan .................................... | 85 |
|  | 1. Kewenangan Bidan......................................... | 93 |
|  | 1. Hubungan Bidan Dengan Pasien..................... | 99 |
|  | 1. Hubungan Bidan Dengan Dokter Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan............... | 100 |
|  | 1. Tanggung Jawab Bidan Dalam Pertolongan Persalinan....................................................... | 103 |
|  | 1. Tanggung Jawab Bidan atas Perbuatan MelawanHukum Terhadap Pasien................... | 115 |
|  | 1. Kasalahan/Kelalaian Bidan Ditinjau dari Hukum Perdata................................................ | 125 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BAB III** | TANGGUNG JAWAB PROFESI BIDAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN PENYELAMATAN PERSALINAN............................................................. | 134 |
|  | 1. Pelayanan Kesehatan Persalinan......................... | 134 |
|  | 1. Pasien Persalinan Dalam Asuhan Bidan.............. | 138 |
|  | 1. Riwayat Asuhan Kebidanan Persalinan............... | 144 |
|  | 1. Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir.................... | 149 |
|  | 1. Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas...................... | 156 |
|  | 1. Asuhan Kebidanan Pada Keluarga Berencana.... | 158 |
|  | 1. Kendala Penyelenggaraan Keselamatan Pasien.. | 160 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BAB IV** | **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PROFESI BIDAN DALAM MENANGANI PERSALINAN DI HUBUNGKAN DENGAN UU NO 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN..........................** | **162** |
|  | 1. Pertanggungjawaban Perdata Profesi Bidan Dalam Menangani Persalinan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan........ | 162 |
|  | 1. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Perdata Profesi Bidang Dalam Menangani Praktik Persalinan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan..................................... | 174 |
|  | 1. Permasalahan dan Proses Penyelesaian Permasalahan Pertanggungjawaban Perdata Profesi Bidan Dalam Menangani Persalinan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan........ | 182 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BAB V** | **PENUTUP.....................................................................** | 197 |
|  | Kesimpulan.................................................................... | 197 |
|  | Saran.............................................................................. | 199 |
|  |  |  |
| **DAFTAR PUSTAKA** | | 200 |